

***THE EFFECT OF LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY  
AND LOCAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON THE QUALITY OF  
LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS AT THE BANDAR LAMPUNG  
CITY FINANCE AND ASSET AGENCY***

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Ester Berlian Agnes Saputri<sup>1</sup>, Meita Sekar Sari<sup>2</sup>, Nur Salma<sup>3</sup>**

Universitas Mitra Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[esterberlian02@gmail.com](mailto:esterberlian02@gmail.com)<sup>1</sup>, [meita@umitra.ac.id](mailto:meita@umitra.ac.id)<sup>2</sup>, [salma@umitra.ac.id](mailto:salma@umitra.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of local financial management accountability and local financial accounting systems on the quality of local government financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) of Bandar Lampung City. This study uses a descriptive quantitative approach with statistical analysis. The sample consisted of 54 respondents who were employees in the fields of accounting, regional assets, and regional cash, selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed using SPSS version 25 through validity tests, reliability tests, classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation), and hypothesis testing with multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results showed that accountability in regional financial management and regional financial accounting systems had a positive and significant effect on the quality of local government financial reports, both partially and simultaneously. This means that improving accountability in regional financial management and implementing a good accounting system will have a direct impact on improving the quality of local government financial reports.*

**Keywords:** *Accountability, SAK, Quality of Financial Statements*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis statistik. Sampel berjumlah 54 responden yang merupakan pegawai bidang akuntansi, aset daerah, dan kas daerah, dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25 melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Artinya, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta penerapan sistem akuntansi yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, SAK, Kualitas Laporan Keuangan

**PENDAHULUAN**

Era otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai elemen kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di tingkat lokal.

Akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan publik, menuntut setiap pihak yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas diperlukan dalam pengelolaan keuangan publik dan transparansi diperlukan untuk

memastikan bahwa pengelolaan keuangan dapat dipercaya (Nugraeni, 2023).

Prinsip *good governance* mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara profesional. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam pendayagunaan potensi daerah masing-masing untuk memajukan daerah tersebut (Bambang, 2021). Sistem akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam proses tersebut, karena menjadi sarana pencatatan transaksi keuangan secara konsisten, sistematis, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban bagi

seluruh perusahaan maupun instansi pemerintah yang harus dilakukan untuk mempertanggung jawabkan aktivitas keuangannya kepada pengguna laporan keuangan tersebut.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, opini laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan mengalami perbaikan. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Meskipun perbaikan telah dilakukan, namun masih terdapat 53 LKPD yang belum memperoleh opini WTP. Hal tersebut disebabkan karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut terjadi pada belanja operasi pada 33 pemda, belanja modal pada 29 pemda, aset lancar pada 22 pemda, dan aset tetap pada 14 pemda. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2024 mengungkapkan 13.271 permasalahan yakni terdiri dari 5.426 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 7.845 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tercatat mencapai sekitar Rp 3.49 triliun. Permasalahan SPI terdiri atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan pelaksanaan pendapatan dan belanja, serta kelemahan pada struktur pengendalian intern (BPK RI, 2024).

Selama periode 2020 - 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2024). Penilaian tersebut diberikan karena dalam laporan keuangan pemerintah daerah ditemukan sejumlah akun yang belum sepenuhnya mengikuti kaidah

penyajian sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada tahun 2020 ketidakpatuhan terhadap SAP tampak pada akun aset lancar, kewajiban jangka pendek, serta penerimaan pembiayaan. Masalah serupa berlanjut di tahun 2021 yang mencakup penyajian yang tidak tepat pada aset lancar, aset tetap, dan kewajiban jangka pendek. Di tahun 2022 ketidaksesuaian masih ditemukan, kali ini pada akun aset lancar, kewajiban jangka pendek, dan biaya operasi. Permasalahan dalam penyajian laporan keuangan ini mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap standar akuntansi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian mengenai topik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga telah dilakukan oleh (Bambang, 2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai sistem akuntansi keuangan daerah juga dilakukan oleh (Nadia, 2022), hasil uji parsial maupun simultan menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang andal. Kualitas laporan keuangan mengacu pada keakuratan dan kejujuran dalam penyajian informasi keuangan (Aprilia, 2023). Kualitas laporan keuangan ini membantu para pemangku

kepentingan membuat keputusan keuangan yang baik (Sudiartana, 2021).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan (Basir, 2020).

### **Indikator Akuntabilitas**

Dimensi akuntabilitas sektor publik dibagi menjadi 4 poin (Bambang, 2021), antara lain:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, Kejujuran terkait akuntabilitas dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil

yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### **Sistem Akuntansi Keuangan**

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian sistem dari mulai proses pengumpulan data, pencatatan, pengikthisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak luar, maupun internal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi (Nindyaningsih, 2022).

### **Indikator Sistem Akuntansi Keuangan**

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah ada 3 poin (Pujanira, 2017) yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini yaitu berbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.
2. Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang berlaku Umum. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam dilakukan berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi. Transaksi yang terjadi juga harus disertai bukti

transaksi. Pencatatan transaksi juga harus dilakukan secara kronologis.

3. Pembuatan Laporan Keuangan secara Periodik. Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik guna kepentingan pengambilan keputusan.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan (Gustina, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan daerah merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus berkualitas, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna (Wulan D. Kindangen, 2022).

### **Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik atau indikator kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Wulan D. Kindangen, 2022), yaitu:

1. Relevan, laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entita pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## METODE PENELITIAN

### 1. Kerangka Berpikir

Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Maka pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan kerangka berpikir (Rohita, 2021).

Sumber: Data Diolah, 2025

### 2. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif lebih memusatkan perhatian pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia, yaitu variabel. Dalam pendekatan

kuantitatif, hakikat hubungan di antara variabel-variabel selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji statistik serta menggunakan teori yang objektif (Jaya, 2020).

Data primer yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data primer dalam penelitian ini yaitu jawaban responden dari kuesioner yang disebar untuk dianalisis. Berdasarkan pengukuran konsep nominal sikap, metode yang digunakan dalam pemberian skor adalah *skala likert*.

### 3. Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai dalam kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung yang berjumlah 193 orang pegawai terdiri dari: Pegawai Bidang Sekretariat, Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, Aset Daerah, dan Kas Daerah. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sebuah cara untuk mendapatkan sampel dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti (M. Syahrani, 2023). Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan, jumlah pegawai yang memenuhi kriteria sebanyak 54 orang, yang terdiri atas pegawai Bidang Akuntansi, Aset Daerah, dan Kas Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini dianalisis menggunakan program komputer statistik SPSS versi 25 dan analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Uji Validitas

**Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kesimpulan
Akuntabilitas	APK1	0,580	0,268	Valid

Pengelolaan Keuangan Daerah (X)	APK2	0,750	0,268	Valid
	APK3	0,776	0,268	Valid
	APK4	0,814	0,268	Valid
	APK5	0,701	0,268	Valid
	APK6	0,440	0,268	Valid
	APK7	0,551	0,268	Valid
	APK8	0,448	0,268	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	SAK1	0,705	0,268	Valid
	SAK2	0,678	0,268	Valid
	SAK3	0,640	0,268	Valid
	SAK4	0,549	0,268	Valid
	SAK5	0,480	0,268	Valid
	SAK6	0,481	0,268	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	KLK1	0,310	0,268	Valid
	KLK2	0,285	0,268	Valid
	KLK3	0,401	0,268	Valid
	KLK4	0,636	0,268	Valid
	KLK5	0,546	0,268	Valid
	KLK6	0,542	0,268	Valid
	KLK7	0,520	0,268	Valid
	KLK8	0,439	0,268	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji validitas terhadap instrumen penelitian, seluruh indikator pada ketiga variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,268. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada kuesioner layak digunakan dalam penelitian ini.

## 2. Uji Reliabilitas

**Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Minimum	Kesimpulan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	0,791	0,60	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,630	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,855	0,60	Reliabel

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.595	5.004			1.917	.061		
	APK (X1)	.310	.097	.370		3.195	.002	.994	1.006
	SAK (X2)	.510	.148	.399		3.443	.001	.994	1.006

a. Dependent Variable: KLK (Y)

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji multikolinieritas pada model regresi, diperoleh nilai Tolerance untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) masing-masing

Daerah (Y)
------------

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha*, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena memiliki nilai di atas batas minimum 0,60. Dengan demikian, seluruh instrumen pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel digunakan untuk penelitian.

## 3. Uji Normalitas

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.95687877
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.078
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

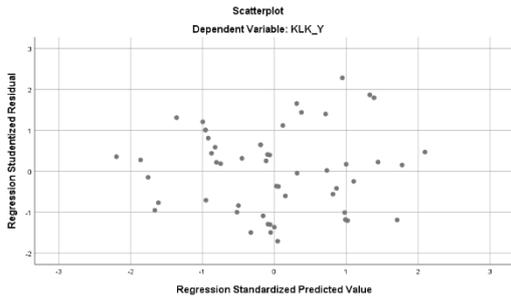
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,200. Nilai ini berada di atas tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

## 4. Uji Multikolinieritas

sebesar 0,994, serta nilai VIF sebesar 1,006. Nilai Tolerance 0,994 > 0,10 dan nilai VIF 1,006 < 10,00 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas di antara variabel independen dalam model regresi.

**5. Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik *scatterplot*, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Pola penyebaran yang tidak teratur ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

**6. Uji Autokorelasi**

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.879 <sup>a</sup>	.773	.764	2.067	2.191

a. Predictors: (Constant), SAK (X2), APK (X1)  
 b. Dependent Variable: KLK (Y)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Dari tabel diatas didapat nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,191 dengan 54 responden. Nilai dL 1,485 dan nilai dU 1,638 (tabel dw terlampir). Jadi dapat dijelaskan nilai sebagai berikut:

- a. dw : 2,191
- b. dL : 1,485
- c. dU : 1,638
- d. 4-dL : 2,515

e. 4-dU : 2,362

Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa  $dU < dw < 4-dU$  2,362 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam penelitian ini.

**7. Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.595	5.004		1.917	.061
	APK (X1)	.310	.097	.370	3.195	.002
	SAK (X2)	.510	.148	.399	3.443	.001

a. Dependent Variable: KLK (Y)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.13 diatas maka dapat dibuat sebuah persamaan koefisien regresi sebagai berikut  $Y = 9,595 + 0,310 X_1 + 0,510 X_2 + e$

**8. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>	
----------------------------	--

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 <sup>a</sup>	.773	.764	2.067

a. Predictors: (Constant), SAK (X2),APK ( X1)  
b. Dependent Variable: KLK (Y)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.14, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,764 menunjukkan bahwa 76,4% variasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) dijelaskan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) dan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), sedangkan 23,6% dipengaruhi faktor lain di luar model.

### 9. Uji T (Parsial)

**Tabel 4. 8 Hasil Uji T (Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.595	5.004		1.917	.061
	APK (X1)	.310	.097	.370	3.195	.002
	SAK (X2)	.510	.148	.399	3.443	.001

a. Dependent Variable: KLK (Y)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X<sub>1</sub>) dilihat dari nilai  $T_{hitung}$  3,195 >  $T_{tabel}$  2,008 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 < 0,05. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Maka kesimpulannya H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X<sub>2</sub>) dilihat dari nilai  $T_{hitung}$  3,443 >  $T_{tabel}$  2,008 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,05. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Maka kesimpulannya H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak.

### 10. Uji F (Simultan)

**Tabel 4. 9 Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	137.075	2	68.538	11.974	.000 <sup>b</sup>
	Residual	291.906	51	5.724		
	Total	428.981	53			

a. Dependent Variable: KLK (Y)

b. Predictors: (Constant), SAK (X2), APK (X1)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.16 diatas diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 11,974 dan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,18. Karena nilai  $F_{hitung}$   $11,974 > F_{tabel}$  3,18 dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Maka  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung**

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup pelaksanaan penganggaran dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan hukum, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika unsur-unsur tersebut berjalan dengan baik, maka informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih valid, relevan, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip *good governance*, yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Bambang, 2021) Berdasarkan uji yang telah dilakukan, hasil yang didapat yaitu

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah, yang berarti bahwa  $H_1$  diterima. Adanya pengaruh positif yaitu menunjukkan bahwa antara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan daerah adalah searah. Artinya, apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik atau meningkat, maka tingkat kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Madiun juga akan semakin tinggi dan presentase opini wajar yang diberikan oleh BPK juga akan ikut meningkat.

#### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung**

Sistem akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan transaksi keuangan secara sistematis dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan sistem yang efektif dan konsisten akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Hal ini memudahkan pihak internal maupun eksternal dalam memahami kondisi keuangan pemerintah daerah dan membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, hipotesis  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Nadia, 2022). Berdasarkan hasil penelitian penerapan

sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut memperkuat hipotesis pertama (H1) yang diajukan yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah atau dengan kata lain jika pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, serta pelaporan meningkat, maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik seiring dengan peningkatan tersebut.

#### **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda secara simultan, dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Dengan demikian  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Jika akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah meningkat secara bersamaan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Hal ini karena pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi amanah oleh masyarakat mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan, didukung oleh pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang

tertata dengan baik, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipercaya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Bambang, 2021) Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi akuntabilitas dan semakin baik sistem akuntansi yang diterapkan, maka kualitas laporan keuangan pun akan meningkat. Pengelolaan keuangan yang akuntabel mencerminkan transparansi dan tanggung jawab, yang turut memengaruhi kualitas serta opini BPK atas laporan keuangan daerah. Sementara itu, sistem akuntansi yang efektif dan sesuai prosedur mendukung proses pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat dan andal. Secara simultan, kedua faktor ini menjadi unsur penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Secara simultan, kedua variabel, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Eka Putri, Meita Sekar Sari Dewi Silvia. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2023.
- Avisha, Andrie. "Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Repository FEB UNPAK*, 2023.
- Bambang Suryono, Febriana Nafi'ah Vidyasari . "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2021.
- Basir, Cik. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaL Pada Entitas Akuntansi*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- BPK RI. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024*. 2024. <https://www.bpk.go.id/ihps> (accessed Mei 02, 2025).
- . *Ragam Opini BPK*. Juli 13, 2020. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk> (accessed Mei 12, 2025).
- Cyrenia Tri Nindyaningsih, Enita Binawati. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *OPTIMAL (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual STIE IEU YOGYAKARTA)*, 2022.
- Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia. *Buku Panduan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia 2024/2025*. Bandar Lampung: Universitas Mitra Indonesia, 2025.
- Feri Lintang Saputra, Amni Zarkasyi Rahman. "Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 2022.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Gustina, Ira. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2021.
- Hatmawan, Riyanto. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. 2020.
- I Made Sudiartana, Ni Komang Ayu Mahartini Anik Yuesti. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem." *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2021.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

- Lakharis Inuzula, Hantono. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- M. Syahrani Jailani, Asrulla Risnita, and Firdaus Jeka. "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2023.
- Nadia Dwi Irmadiani, Budiman Slamet. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ." *Public Service And Governance Journal*, 2022.
- Nugraeni, Azza Nur Zubaidah. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2023.
- Pujanira, Putriasri. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY." *Jurnal Nominal*, 2017.
- Rara Juniar Variana, Septian Asriadii Putra. "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2021.
- Rohita. *Metode Penelitian (Panduan Praktis Untuk Mahasiswa dan Guru)*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual SPSS)*. 2017.
- Sudaryono. *Statistika 1 (Statistika Deskriptif Untuk Penelitian)*. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods Cetakan Ke Sepuluh)*. Bandung, 2020.
- Wiratna, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Wulan D. Kindangen, Ferdinand Vikky Rompas. "Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2022.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003